

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.¹¹

2. Formulasi Dan Ketentuan Pidana

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Menurut Satjibto Raharjo, proses penegakan hukum menjangkau sampai tahap pembuatan

¹¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 dan 4

undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai penentu bagaimana penegakan hukum itu diajalkan. Kegagalan penegakan hukum itu bersumber dari perumusan awal undang-undang. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dibuat dan dibentuk untuk penegakan hukum dibidang kejahatan narkoba.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diatur dalam pasal 110 samapai pasal 148, sepeti kebanyakan undang-undang diluar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan sedemikian rupa dengan harapan efektif dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, harus dilakukan secara hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan untuk menghindari kesalahan dalam praktik.

Setidaknya ada dua pokok yang dapat ditemukan dari perumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu adanya semangat pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap penyalahgunaan narkoba. Konsekuensi dari kedua semangat tersebut adalah memberi sanksi yang keras kepada peredar narkoba dan prekursor narkoba, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba

didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Seperti yang tertuang dalam pasal 4 huruf c dan d Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.¹²

3. Tindak Pidana Narkotika

Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal ini terbukti dapat dilihat dari penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I : pidana mati/penjara 20 tahun dan denda 1 milyar rupiah;
- b. Narkotika golongan II : pidana penjara 15 tahun dan denda 500 juta rupiah;
- c. Narkotika golongan III : pidana penjara 10 tahun dan denda 300 juta rupiah.¹³

¹² AR Sujono dan Bony daniel, *Op.cit.* Hal.211 sampai 225

¹³ S. Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, Halaman 3 dalam skripsi, “ Analisis Yuridis Putusan Hakim No: 125/Pid.Sus/2013/PN.PL.R

4. Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum pidana, hal yang dilakukan tanpa "hak" atau "melawan" hukum juga disebut dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut P.A.F Lamintang, sebuah perbuatan dapat dikatakan "*wederrechtelijk*" jika memenuhi deskripsi sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- b. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- c. Tanpa hak yang ada dalam diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.¹⁴

Berdasarkan konsep perbuatan tanpa hak atau melawan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Terkait perbuatan melawan hukum, Andi Hamzah Menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik yang dapat dibuktikan.¹⁵

Simon menyatakan bahwa pengetahuan sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya.¹⁶ Dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, beliau mengatakan selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada

¹⁴ Lamintang, 1997. Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hal. 354

¹⁵ Andi Hamzah, 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka cipta. Hal 69

¹⁶ Lamintang, Op.Cit. Hal.355

perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan tersebut, hakim tetap kaitkan pada undang-undang. Artinya harus dibuktikan dengan tegas dirumuskan undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Penyalahgunaan yang dimaksud di sini memiliki asosiasi dengan penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan penafsiran pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka penyalahgunaan narkotika adalah pengguna narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan akan zat yang digunakan, karena narkotika memiliki sifat adiktif menjadikan seseorang yang pernah menggunakan narkotika akan merasa ingin menggunakan lagi. Untuk menghilangkan *simptom* atau gejala kecanduan yang terjadi padanya, misalnya kelelahan, mengantuk, dan semangat berlebihan. Narkotika yang berbeda dapat menimbulkan efek yang berbeda.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, disyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, lebih membatasi penggunaan narkotika golongan I, yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkotika sesuai

prosedur yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 7 dan pasal 8 maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau bersifat melawan hukum.

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengaertian tersebut maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu:

- a. Orang yang menggunakan narkotika dalam ketergantungan secara fisik maupun psikis.
- b. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam ketergantungan secara fisik maupun psikis.

B. Tinjauan Umum Tentang Dakwaan

1. Pengertian Dakwaan Dan Fungsi Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara¹⁷.

Surat dakwaan juga sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh

¹⁷ Andi Hamzah. 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 167

mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Demikian juga dalam tindak pidana, yang walaupun disebutkan didalamnya, tetapi jika tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian juga tidak dapat dipidana jika pidana tersebut telah terjadi secara lain dari yang telah dinyatakan didalam dakwaan.

Buku Pedoman Pembatasan surat Dakwaan (BPPD) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, halaman 7 mengemukakan, bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi yaitu :

- a. Segi positif: bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.
- b. Segi negatif: apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Dari ketentuan tersebut maka dapat diambil kesimpulan, bahwa surat dakwaan mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Segi positif: bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Dan hal-hal yang tidak terbukti dalam persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. jadi terdakwa hanya dapat

mempertanggungjawabkan pada bagian dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan.

- b. Segi negatif: bahwa hal-hal yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan, atau dakwaan yang tidak terbukti.

2. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategis dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik proses penuntutan dikenal dengan beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :

1. Dakwaan tunggal

Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Subsidiar

Dalam dakwaan subsidiar didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat

ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan dalam sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Dakwaan ini digunakan apabila, suatu akibat yang timbul oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilarangnya. Dalam dakwaan ini terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karenanya, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana pokok terberat, ditempatkan pada lapisan atas dan pidana yang diancam lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika suatu dakwaan satu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Dakwaan Alternatif

Rumusan dalam dakwaan alternatif mirip dengan dakwaan subsidair yaitu suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan

maka digunakan bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya menunjukkan corak/ciri yang sama. Misalnya pencurian dengan penadahan, penipuan dengan penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan sebagainya. Jaksa dalam dakwaan alternatif menggunakan kata sambung atau.

4. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif, dalam dakwaan kumulatif didakwakan secara bersamaan beberapa delik dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadi kumulasi, baik kumulasi perbuatan, maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5. Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Dalam dakwaan campuran/kombinasi terdapat dua perbuatan akan tetapi jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan yang dilakukan tersebut.

3. Manfaat Dakwaan

Surat dakwaan penting artinya bagi penuntut umum, terdakwa/ penasehat hukum atau bagi hakim sendiri. Adapun manfaat dari surat dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum
 - a. Sebagai dasar penuntutan terdakwa
 - b. Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa
 - c. Sebagai dasar pembahasan juris dan tuntutan pidana
 - d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum
2. Bagi terdakwa/penasehat hukum
 - a. Sebagai dasar penyusun pembelaan (*pledoi*)
 - b. Sebagai dasar menyiapkan buku-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum (*alibi*)
 - c. Sebagai dasar pembalasan juris
 - d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum
3. Bagi hakim
 - a. Sebagai dasar pemeriksaan didalam sidang pengadilan
 - b. Sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan
 - c. Sebagai dasar mebuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

4. Syarat dakwaan

Menurut pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi antara lain:

a. Syarat formil

Syarat formil yang ada dalam pasal 143 ayat (3) huruf a KUHAP yang mencakup:

- 1) Diberi tanggal
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
 - a) Nama lengkap
 - b) Tempat lahir
 - c) Umur/tanggal lahir
 - d) Jenis kelamin
 - e) Kebangsaan
 - f) Tempat tinggal
 - g) Agama dan
 - h) Pekerjaan.
- 3). Ditandatangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dibatalkan oleh hakim, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*).

b. Syarat materiil

Bahwa menurut pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian yang dilakukan dengan menyebutkan waktu (*tempos delicti*) dan tempat tindak pidana (*locus delicti*). Dalam surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Adapun pengertian yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut :

a. Cermat

Cermat berti surat dakwaan itu disiapkan sesuai undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak dapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan “batalnya surat dakwaan” atau “surat dakwaan tidak dapat dibuktikan” antara lain karena:

- 1) Apakah ada pengadukan dalam hal delik aduan ?
- 2) Apakah penenerapan hukum atau ketentuan pidana sudah tepat/
- 3) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidanan tersebut ?
- 4) Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa ?
- 5) Apakah tindak pidana yang dilakukan itu tidak *nebis in idem* ?

b. Jelas

Syarat dikatakan surat dakwaan jelas apabila dalam surat dakwaan, penuntut umum harus mampu untuk :

1) Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan

2) Menguraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu dengan yang lain. Atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsur berbeda satu sama lain. Atau uraian dakwaan hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur berbeda. Misalnya tidak boleh menggabungkan unsur-unsur:

a) Pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

b) Pasal 372 dan pasal 378.

c) Dan sebagainya sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan batalnya suatu putusan.

c. Lengkap

Lengkap berarti uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara lengkap, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Mengenai syarat materiil yang harus ada dalam surat dakwaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rumusan dari tindak pidana/perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas.

a). Perumusan unsur objektif, yaitu:

- Bentuk atau macam tindak pidana
- Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

b.) Perumusan unsur subjektif

Perumusan unsur objektif yaitu pertanggungjawaban seorang menurut hukum. Misalnya ada kesengajaan, kelalaian dan sebagainya.

2) Uraian mengenai:

a) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) tentang pentingnya mengetahui tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti*) adalah hubungannya dengan beberapa ketentuan pasal dalam KUHP, seperti:

- Kopetensi relatif dari pengadilan, seperti yang dimaksud dalam pasal 148 dan 149 jo pasal 84 KUHP.
- Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (pasal 2 samapai pasal 9 KUHP)

- Berkaitan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, seperti “dimuka umum” misalnya pasal 154, pasal 156, pasal 156 huruf a dan pasal 160 KUHP.
- b) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempos delicti*) mengenai *tempos delicti* ini penting untuk menentukan:
- Menentukan belaku surutnya suatu kejadian seperti dalam pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) KUHP.
 - Penentuan tentang *residivist* (pasal 486-488 KUHP)
 - Menentukan tentang kadaluarsa (pasal 78 dan 82 KUHP)
 - Menentukan kepastian umur terdakwa, seperti yang dimaksud dalam pasal 45 KUHP atau si korban dalam delik tertentu seperti delok asusila.
 - Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan seperti pasal 363 KUHP atau secara tegas disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dilakukan terdakwa (pasal 123 KUHP).

5. Pembatalan surat dakwaan

Pembatalan surat dakwaan menurut Mederburgh, “pembatalan atas surat dakwaan ada dua macam karena tidak memenuhi syarat” sebagai berikut:

- a. Pembatalan formil (*formele nietgheid*)

Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang, yang bersifat lahir dan normatif, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang.

b. Pembatalan yang hakiki (*wezenlijke nietigheid*)

Pembatalan ini juga disebut pembatalan *essential* atau pembatalan yang substansial. Pembatalan ini adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap *essential*. Contohnya seperti pembuatan surat dakwaan yang tidak jelas, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat. Oleh karena itu surat dakwaan tidak dapat memenuhi tujuan yang sebenarnya, walaupun syarat materil terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut *obsuur liabel*. Dengan demikian hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara formil karena ada syarat dalam undang-undang yang tidak dipenuhi. Dalam hal ini diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Alat Bukti Dan Hukum Pembuktian

¹⁸ Anggara Mahendra Nuswantoro Putro, “Tinjauan Yuridis Pengabaian Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Mengenai rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 112/Pid.Sus/PN. Sda), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Perpustakaan Pusat: Universitas Muhammadiyah Malang Hal 1-32

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan pembuktian tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁹

2. Jenis alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktian

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Hanya keterangan saksi yang diberikan di muka sidang yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (1) KUHAP).²⁰

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli diterangkan dimuka penyidik atau penuntut umum, walaupun dengan mengingat

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandara Maju. Hal 11

²⁰ MHA Kuffal. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktikum Hukum*. Malang. UMM Press. Hal 15

sumpah waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli merupakan apa yang orang ahli nyatakan disidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

c. Surat

Surat adalah merupakan alat bukti yang sah, ada empat macam surat yaitu:

1. Berita acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwanang atau yang dibuat dihadapanya, yang memuat mengenai keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dan disertai dengan alasan tentang alasan itu.
2. Surat dibuat menurut aturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal tatalaksana yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.
3. Surat keterangan dari orang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa suatu tindak pidana. Petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan saksama berdasarkan hati nuraninya (pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 KUHAP).²¹

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim

Secara aspek filosofis kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diharapkan mampu memberikan kedamaian pada masyarakat saat kekuasaan negara seperti eksekutif dan kekuasaan legislatif hanya menompang kelompok tertentu dalam masyarakat. Secara etimologi kata hakim berasal dari bahasa arab *hakam*; *hakiem* yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional hakim diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa para pencari keadilan. Dalam tataran teoritis, hakim juga diharapkan mampu

²¹ *Ibid.* hal. 22-25

memberikan pengayoman sehingga putusan yang dijatuhkan pada para pencari keadilan tidak semata sebagai upaya *ultimatum remedium* tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pelanggaran hukum.²²

2. Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Berragamnya kasus dapat berpengaruh terhadap hasil putusan hakim. Namun hal ini masih banyak faktor lainnya, seperti situasi dan kondisi masyarakat, sistem pengawasan dan lain-lain. Kasus di pengadilan jika dikaitkan dengan kondisi hakim yang dapat mempengaruhi putusan sebagai berikut :

a. Profesionalisme hakim

ada perkara yang sederhana, mudah namun ada perkara yang sulit. Bagi hakim yang profesional (dalam arti memiliki keahlian yang memadai dan berpengalaman) variasi masalah tersebut tidak menjadi masalah, akan tetapi bagi hakim yang kurang dalam keahlian dan pengalaman. Misalnya hakim yunior, maka akan berpengaruh sekali dalam menangani perkara yang sulit. Hal ini karena dalam penyelesaian perkara masih baru belajar, masih meraba-raba, cari pengalaman dan sikap lainnya yang mengandung faktor *spekulasi*, apalagi dalam undang-undang hakim tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan padanya, sehingga dengan kemampun yang terbatas hakim (yunior) dipaksa

²² Sadikin sabirin. 2010. *Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI hal. 7

menyelsaikan perkara yang ada, termasuk perkara yang sulit. Jika tidak diawasi maka akan menghasilkan putusan yang “cacat”.

b. Semangat hakim

Ada perkara yang menarik dan membuka tantangan, perkara-perkara semacam ini dapat memacu semangat hakim untuk belajar, berkembang dan berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Apabila bagi hakim yang memiliki kegemaran menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang kontriversial dan kasus yang ditangani menjadi perhatian masyarakat atau bersifat nasional, maka kesempatan seperti itu tentu tidak disia-siakan. Sebaliknya jika perkara yang ditangani banyak, tidak menarik, dan cenderung bersifat rutin, maka dapat menimbulkan kejenuhan pada diri hakim. Apalagi hakim terjebak dalam rutinitas dan tuntutan target penyelesaian perkara yang tidak seimbang. Kondisi ini jika berlarut-larut akan menimbulkan pengaruh buruk, yaitu membentuk perilaku hakim seperti cenderung bekerja secara mekanis, dengan pertimbangan yang tidak teliti, kurang mempertimbangkan aspek-aspek diluar aspek yuridis secara mendalam, menyamaratakan kasus yang satu dengan perkara yang lain dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan.

c. Kepribadian hakim

Ada perkara yang menyangkut objek perkara kecil, beresiko tinggi dan bersifat ketat, namun ada juga perkara yang

menyakut obkjek perkara besar (perkara perdata), namun resikonya kecil atau bahkan tidak berisiko sama sekali, dalam artian memberi peluang untuk menyimpang/berkolusi. Bagi hakim yang memiliki kepribadian yang kuat atau teguh berpegangan pada komitmennya sebagai penegak hukum yang adil, karena yang menjadi tujuannya adalah bagaimana dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya dan memutuskan seadil-adilnya. Sebaiknya bagi hakim yang memiliki kepribadian yang “renta” maka jenis perkara tersebut sangat berpengaruh sekali karena pertimbangannya tidak lagi sesuai dengan komitmennya, namun mengarah pada perhitungan “untung-rugi”. Kebanyakan hakim mengambil jalan tengah, yakni tidak menolak “bonus” tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan. Dalam kondisi yang parah, beberapa oknum hakim tidak saja meminta namun berani menentukan tarif untuk sebuah orderan putusan tertentu. Kondisi seperti ini tentu merusak konsep “adil dan tidak memihak” yang dijunjung tinggi dalam dunia peradilan. Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa jenis kasus/perkara dapat berpengaruh terhadap “output” lembaga peradilan, namun sekali lagi kajian tersebut tidak dapat diperlakukan secara absolut, namun masih sangat tergantung dengan kondisi “input” lainnya terutama adalah faktor integritas hakim.²³

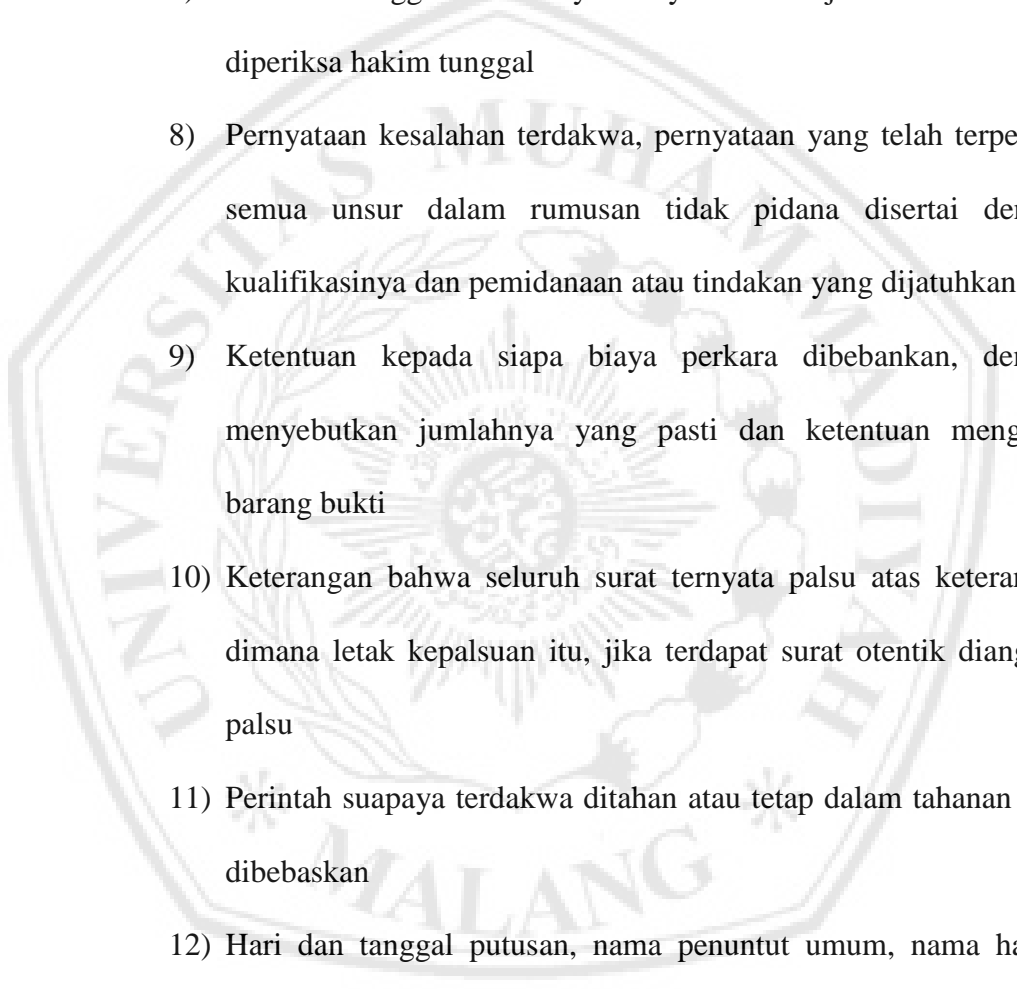
²³ Al. Wisnubroto. 1997. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* . Yogyakarta, penerbitan

3. Syarat Formil Dari Putusan Hakim

Secara esensial format atau kerangka dasar dari putusan hakim mengacu pada ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, aspek pada ketentuan pasal tersebut harus dicermati hakim terutama dalam putusan pemidanaan dan jika hal tersebut dilanggar akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP), sedangkan pada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum formil kerangka dasar dari putusan hakim selain mengacu pada ketentuan pasal 197 KUHAP.

Dalam putusan pidana hakim sebagai dasar putusnya melihat pasal 197 KUHAP didalam penjelasannya yakni :

- a. Surat pemidanaan memuat :
 - 1) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 - 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
 - 3) Dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan
 - 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
 - 5) Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan

- 
- 6) Pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
 - 7) Hari dan tanggal diadakanya musyawarah majelis hakim kecuali diperiksa hakim tunggal
 - 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan yang telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tidak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
 - 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atas keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
 - 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
 - 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- b. Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum.
- c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan undang-undang ini.

4. Syarat Materiil Dari Putusan Hakim

Hakim dalam melaksanakan putusanya melihat berdasarkan barang bukti yang telah dipakai karena acuan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemedanaan bagi terdakwa, dimana hakim melihat pasal 184 dalam. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ayat (2) hal yang secara umum sudah diketahui.

Dalam hal ini dijelaskan apa yang dimaksud macam-macam alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan saksi adalah suatu keterangan dengan lisan dimuka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dialami sendiri. Sering terjadi pula keterangan saksi itu tidak lisan melainkan tulisan, apabila tulisan dibacakan (dengan lisan) didepan hakim dan sesudahnya diserahkan kepada hakim. Keterangan yang diucapkan didepan polisi itu bukan kesaksian, lain halnya apabila keterangan didahului

dengan sumpah terlebih dahulu, ditetapkan dalam berita acara yang dibacakan didepan sidang.

- b. Keterangan ahli keterangan ahli bukan apa yang oleh ahli diterangkan dimuka penyidik atau penuntut umum, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan sidang dipengadilan setelah ia mengucapkan sumpah janji dihadapan hakim.
- c. Surat surat adalah alat bukti yang sah, pasal ini membedakan atas empat macam surat yaitu :
 - 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat mengenai keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, beserta dengan alasan.
 - 2) Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam hal tata laksanaan yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - 3) Surat ketengan dari orang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya menganai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi.
 - 4) Suarat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat pembuktian lain.

- d. Petunjuk merupakan suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antar satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tidak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- e. Keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. keterangan terdakwa juga merupakan bukti yang sah, dimana keterangan terdakwa yang ucapakan didalam sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang terdahulu yang terdakwa nyatakan bukan merupakan bukti yang sah. Agar supaya keterangan terdakwa cukup dalam pembuktian terdakawa salah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa harus ditambah lagi dengan satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan terdakwa, satu keterangan ahli, satu surat dan satu petunjuk.

Dalam melaksanakan putusannya hakim juga melihat ketentuan berdasarkan pasal 185 KUHAP sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang dipengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat menjabarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh oleh hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- f. Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - 1) kesesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya;
 - 2) kesesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya;
 - 3) Alasan mungkin yang dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Tentang Pertimbangan Hakim

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, merupakan konteks penting dalam putusan hakim, mengapa sampai dikatakan demikian karena hakikat pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandelen*) dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan.

Lazimnya dalam praktik dipengadilan pada putusan hakim, sebelum pertimbangan-pertimbangan *yuridis* ini dibuktikan dan dipertimbangkan. Maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan kongklusi *kumulatif*, keterangan pada saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, modus opradi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang, mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maka diperlukan pembuktian, bahwa benar suatu peristiwa suatu pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus

mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini ada 4 teori pembedaan pembuktian yaitu :

1. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian *Conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan kesalahan terdakwa.

2. *Conviction-raisonnee*

Dalam teori ini tetap berpegangan pada keyakinan hakim dalam menentukan terdakwa bersalah. Akan tetapi dalam teori ini keyakinan hakim dibatasi, dan harus didukung dengan alasan yang jelas. Hakim harus memberikan alasan yang jelas, alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak dibuat dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviktion time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan sistem pembuktian keyakinan dengan sistem pembuktian undang-undang secara positif.²⁴

Alat-alat bukti yang sah, apabila ada hubungan dengan suatu tindak pidana, menurut pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dimana keterangan aksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang dialami saksi sendiri, dilihat sendiri dan alam sendiri dan harus diwahi sumpah. Sedangkan petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk ditentukan oleh hakim. Dan keterangan yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri untuk menentukan berat ringannya dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan.

²⁴ Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 273

Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal yang bersifat *korelasi* antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa yang bisa dengan radeaksional. Pada hakikatnya dalam pembuktian yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim harus menguasai mengenai aspek *teoritik* dan praktik. Pandangan *doktrin jurisprudence* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara *limitative* menetapkan pendiriannya dalam teori :

- a. Teori kehendak (*wills theorie*) dari *Von Hippel* mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai *de will* atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*hendeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Fank atau “*waarschijulykheis theorie*” dari *van bemelen* yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari pembuat. Setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Kemudian selain diuraikan mengenai unsur-unsur (*bestsnddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka terhadap tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dalam praktik peradilan setidaknya ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim yaitu :

- a. Dalam tanggapan majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. Apabila ditinjau dari segi letaknya, tanggapan dan pertimbangan tersebut dalam putusan ada yang langsung menanggapi ketika mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan ada pula yang dalam pertimbangan khusus setelah selesainya pertimbangan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan.
- b. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan pertimbangan secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya, lazim dalam praktik sering kali dijumpai pertimbangan selintas tersebut.
- c. Menimbang, bahwa terhadap pemebelaan/pledoi dari terdakwa/penasihat hukum karena tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta *irrelevant* untuk pertimbangan.
- d. Ada pula majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat

hukumnya. Tahu-tahu pertimbangan langsung menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.

2. Pertimbangan Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif ialah dakwaan yang antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain dalam dakwaan alternatif harus:

1. Saling mengecualikan
2. Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hakim dalam memeriksa perkara dalam dakwaan alternatif harus menggunakan cara:

1. Hakim memeriksa dan memepertimbangkan lebih dahulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan;
 - a. Apabila dakwaan urutan pertama terbukti pemeriksaan terhadap dakwaan selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.
 - b. Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

2. Jika urutan dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan
 - a. Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan dakwaan pertama yang tidak terbukti dan
 - b. Menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.

Tujuan yang hendak dicapai surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran:

- a. Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) atau dalam diri penuntut umum terdapat keragu-raguan dalam menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan pada pelaku.
- b. Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.

F. Tinjauan Tentang Aspek Keadilan

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu²⁵:

1. Keadilan distributif atau *justitia distributiva*

Keadilan distributif ialah keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antar masyarakat

²⁵ R. Soeroso. 2002. *Pengaturan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 63-64

dengan perorangan. Disini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan.

2. Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*

Keadilan kumulatif adalah keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar, antar barang yang ditukar hendaknya sama banyak atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antar perorangan.

Kaum positivesme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemafaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

Dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Keadilan hukum merupakan keadilan etis, aliran etis yang menggagap bahwa pada perinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.²⁶ Akan tetapi, keadilan merupakan suatu yang relatif dalam tujuanya. Tidak semua yang dianggap adil bagi satu orang dapat dikatakan adil pula bagi sekelompok orang maupun masyarakat lainnya.

G. Tinjauan Tentang Aspek Kepastian

²⁶ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksabang Presindo. Hal. 59

Kepastian merupakan salah satu dari tujuan hukum yang ada di Indonesia. Banyak permasalahan hukum di Indonesia menyebabkan ketidakpastian penerapan hukum, sehingga seringkali penerapan hukum dalam kenyataan tidak sesuai, bahkan jauh berbeda dengan teori yang ada. Semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukunya. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukumnya.²⁷

Sejak dikumandangkannya kemerdekaan Indonesia sejak 70 tahun lalu hingga saat ini Indonesia masih dirasa kurang produktif dalam membuat hukum bagi masyarakat. Tidak sedikit peraturan yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi hal tersebut dirasa semakin lama menjadi semakin tumpang tindih sehingga membingungkan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari permasalahan hukum terutama penerapannya. Kepastian hukum merupakan suatu tujuan hukum, yang mengutamakan kepada kumpulan peraturan tanpa melihat keadilan maupun kemanfaatan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁸

²⁷ Jan Michiel Otto. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Hal. 5-6

²⁸ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Hukum*. Bandung: Aditya Bakti. Hal. 23

Kepastian hukum termasuk dalam aliran normatif yuridis, aliran normatif yuridis menganggap bahwa pada prinsip tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistik yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain adalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja serta tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²⁹

Menurut aliran ini selanjutnya, walapun aturan hukum atau penerapannya hukum terasa tidak adil dan tidak memberi manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.³⁰

H. Tinjauan Tentang Aspek Kemanfaatan

Aspek kemanfaatan hukum merupakan salah satu aspek dalam tujuan hukum yang digunakan di Indonesia selain keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang termasuk dalam aliran teori Utilitas. Aliran ini menganggap bahwa pada asas hukum itu bertujuan semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau bagi warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill. Jeremy Bentham (Daliyo, 2004:39) berpendapat, bahwa

²⁹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 130

³⁰ Ibid., hal. 131

tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang banyak.

Soebekti yang juga dikatakan sebagai penganut aliran Utilitis, menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yaitu, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Artinya tujuan hukum hendaknya memberi manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral teoritis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat, pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi warga masyarakat.³¹

³¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. *Pengaturan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 118